

Article Informations
Corresponding Email:
sandygernadin21@gmail.com

Received: 08/05/2026; Accepted:
03/06/2026; Published: 30/06/2026

KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA DALAM MENGHADAPI EMBARGO EKONOMI AMERIKA SERIKAT PADA TAHUN 2022-2023

Sandy Gernadin

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Rusia dalam merespons embargo ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2022–2023 sebagai akibat dari invasi Rusia ke Ukraina. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik studi pustaka dan wawancara untuk memperoleh data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rusia mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang berfokus pada diversifikasi hubungan ekonomi dan diplomatik melalui aliansi strategis dengan negara-negara non-Barat seperti BRICS dan China. Selain itu, Rusia melakukan reorientasi ekonomi dengan memperkuat sektor energi, menciptakan mekanisme pembayaran alternatif, serta mengembangkan strategi substitusi impor. Dalam sektor pertahanan, Rusia meningkatkan ekspor alutsista dan mempererat kerja sama militer dengan negara-negara *Global South*. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Rusia bersifat reaktif dan strategis, dengan tujuan utama mempertahankan kedaulatan ekonomi dan posisi geopolitik di tengah tekanan sanksi internasional. Rusia menunjukkan kapasitas adaptif yang signifikan melalui reposisi diplomatik dan ketahanan ekonomi nasional sebagai respons terhadap dominasi sistem internasional oleh kekuatan Barat.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Embargo Ekonomi, Rusia, Amerika, Neo-Realisme.

Abstract

This study aims to analyze Russia's foreign policy in responding to the economic embargo imposed by the United States in 2022–2023 as a result of the Russian invasion of Ukraine. Using a descriptive-analytical qualitative approach, the study applies literature reviews and interviews to gather relevant data. The results indicate that Russia adopted a foreign policy focused on diversifying economic and diplomatic relations through strategic alliances with non-Western countries such as BRICS and China. Furthermore, Russia implemented economic reorientation by strengthening the energy sector, developing alternative payment systems, and promoting import substitution strategies. In the defense sector, Russia expanded arms exports and

enhanced military cooperation with Global South countries. The study concludes that Russia's foreign policy is reactive and strategic, aiming to maintain economic sovereignty and geopolitical standing amid international sanctions. Russia demonstrates significant adaptive capacity through diplomatic repositioning and economic resilience in response to Western-dominated international structures.

Keywords: Foreign Policy, Economic Embargo, Russia, America, Neo-Realism.

1. PENDAHULUAN

Konflik antara Rusia dan Barat, khususnya Amerika Serikat, telah memasuki babak baru sejak invasi militer Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Tindakan ini segera mendapat respons dari Amerika Serikat dalam bentuk embargo ekonomi yang luas, mencakup pembatasan akses perbankan, larangan ekspor teknologi strategis, serta sanksi terhadap sektor energi dan pertahanan Rusia. Embargo ini bukan hanya sekadar upaya menghukum tindakan militer Rusia, tetapi juga merupakan bagian dari strategi geopolitik Amerika Serikat untuk melemahkan kapabilitas strategis Rusia dalam sistem internasional yang didominasi kekuatan Barat.

Dari sudut pandang hubungan internasional, kebijakan luar negeri Rusia dalam menghadapi embargo ini mencerminkan respons strategis negara dalam mempertahankan kedaulatan nasional dan posisi globalnya. Berbagai kebijakan luar negeri yang ditempuh Rusia, seperti dedolarisasi, reorientasi aliansi ke negara-negara Timur, dan diversifikasi sektor energi, menunjukkan upaya sistematis untuk melakukan *balancing* terhadap tekanan Barat. Pendekatan ini sesuai dengan asumsi dasar neorealisme yang menyatakan bahwa negara akan selalu berupaya mempertahankan kekuatannya dalam sistem internasional yang anarkis dan kompetitif (Waltz, 1979; Waltz, 2008).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana negara-negara besar seperti Rusia merespons tekanan eksternal tidak hanya melalui instrumen militer, tetapi juga melalui kebijakan luar negeri yang terstruktur. Dalam konteks hubungan internasional kontemporer, embargo ekonomi telah menjadi instrumen kekuasaan yang semakin lazim digunakan oleh negara-negara hegemonik, menggantikan intervensi bersenjata sebagai sarana untuk memaksakan kepentingan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, analisis terhadap respons Rusia memberikan wawasan penting bagi studi

kebijakan luar negeri dan tatanan global yang tengah mengalami transformasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan luar negeri Rusia dalam merespons embargo ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2022–2023. Penelitian ini secara khusus menelaah bagaimana strategi diplomasi Rusia, penguatan hubungan dengan mitra non-Barat seperti BRICS dan China, serta upaya diversifikasi ekonomi menjadi bagian dari upaya mempertahankan stabilitas nasional dan menghindari isolasi global. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil Rusia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber ahli di bidang hubungan internasional. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori neorealisme Kenneth Waltz yang menjelaskan bagaimana distribusi kapabilitas dalam sistem internasional menentukan perilaku negara (Waltz, 1979; Waltz, 2008).

Sejumlah studi terdahulu memberikan kontribusi penting bagi penelitian ini. Duong et al. (2025) menunjukkan bahwa sanksi ekonomi mendorong perusahaan energi Rusia melakukan substitusi impor dan efisiensi internal. Zeng dan Dür (2025) menemukan bahwa negara-negara yang terkena sanksi cenderung meningkatkan belanja militer sebagai bentuk resistensi struktural. Sementara itu, Huynh et al. (2025) menyoroti dampak sanksi terhadap performa perusahaan non-keuangan Rusia dan kemampuan adaptasi mereka dalam jangka menengah. Namun, ketiga studi tersebut lebih menekankan aspek mikro dan tidak membahas strategi makro kebijakan luar negeri yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, penelitian ini mengembangkan asumsi bahwa kebijakan luar negeri Rusia dalam menghadapi embargo ekonomi Amerika Serikat bersifat reaktif-strategis. Kebijakan ini diarahkan bukan hanya untuk menahan tekanan ekonomi jangka pendek, tetapi juga untuk membentuk kembali tatanan kekuasaan

global yang lebih multipolar. Dalam kerangka ini, diplomasi energi, kerja sama militer, serta aliansi strategis diposisikan sebagai instrumen utama *balancing* terhadap dominasi Barat.

2. PEMBAHASAN

Kebijakan Rusia melalui BRICS

Salah satu respons utama Rusia terhadap embargo ekonomi Amerika Serikat adalah memperkuat diplomasi multilateral melalui forum BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Forum ini dipandang oleh Rusia sebagai kendaraan strategis untuk mendorong lahirnya tatanan dunia multipolar dan mengurangi ketergantungan terhadap institusi internasional yang didominasi oleh negara-negara Barat, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Dalam kerangka neorealisme, langkah ini mencerminkan upaya *balancing* eksternal, di mana Rusia berusaha menyeimbangkan tekanan kekuatan dominan melalui pembentukan aliansi alternatif.

Pasca pemberlakuan embargo pada awal 2022, Rusia memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatik dengan anggota BRICS, terutama dengan China dan India. Melalui "*Foreign Policy Concept of the Russian Federation 2023*", pemerintah Rusia secara eksplisit menyatakan bahwa BRICS akan menjadi pilar utama dalam kebijakan luar negerinya. Tujuannya adalah menciptakan sistem internasional yang lebih adil, seimbang, dan tidak bergantung pada tatanan global unipolar yang dikendalikan oleh Amerika Serikat.

Rusia mendorong dedolarisasi sebagai agenda utama kerja sama di BRICS. Hal ini diwujudkan dengan promosi penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan antarnegara anggota, serta rencana pembentukan mata uang bersama BRICS yang bersifat multilateral. Langkah ini dianggap krusial mengingat dominasi dolar AS dalam sistem keuangan global telah menjadi instrumen efektif dalam pemberlakuan sanksi oleh negara Barat. Dalam konteks ini, dedolarisasi bukan hanya kebijakan ekonomi, melainkan strategi geopolitik untuk melindungi kedaulatan fiskal dan moneter Rusia dari tekanan eksternal.

Selain dalam bidang moneter, BRICS juga menjadi platform penting bagi Rusia dalam memperluas kerja sama teknologi, pendidikan, dan infrastruktur. Salah satu bentuk konkret adalah pengembangan sistem pembayaran antarnegara BRICS, yang memungkinkan transaksi lintas batas tanpa melalui sistem keuangan Barat seperti SWIFT. Rusia secara aktif mempromosikan penggunaan SPFS (*System for Transfer of Financial Messages*), sistem keuangan alternatif yang dikembangkan oleh Bank Sentral Rusia, sebagai pengganti SWIFT bagi negara-negara sahabat.

Dalam bidang diplomasi, Rusia meningkatkan intensitas pertemuan tingkat tinggi di dalam forum BRICS, serta mendorong pembentukan blok-blok kerja sama tematik seperti BRICS *Energy Research Platform* dan BRICS *Vaccine Research Center*. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya melihat BRICS sebagai aliansi simbolik, melainkan sebagai forum kerja sama fungsional yang dirancang untuk mendukung ketahanan nasional di bawah tekanan sanksi. Menurut pendekatan neorealisme, penguatan institusi semacam ini adalah bentuk adaptasi strategis terhadap sistem internasional yang tidak bersahabat (Waltz, 2008).

Secara politis, BRICS juga memberi legitimasi internasional bagi Rusia, terutama dalam menghadapi isolasi diplomatik dari negara-negara Barat. Selama masa pemberlakuan sanksi, Rusia tetap diundang dan menjadi aktor aktif dalam KTT BRICS dan dialog mitra eksternal, yang mencerminkan bahwa negara tersebut tidak sepenuhnya terpinggirkan dari komunitas internasional. Hubungan ini memberi ruang bagi Rusia untuk menyampaikan narasi alternatif mengenai konflik Ukraina dan kebijakan luar negerinya, serta memperkuat dukungan global dari negara-negara *Global South* yang memandang embargo sebagai bentuk dominasi imperialis Barat.

Dengan demikian, kebijakan luar negeri Rusia melalui forum BRICS bukanlah langkah taktis jangka pendek, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk membentuk kembali tatanan global. BRICS digunakan sebagai platform untuk melakukan reorientasi aliansi, mendukung dedolarisasi, dan memperkuat institusi ekonomi alternatif yang mampu menopang ketahanan nasional. Dalam perspektif neorealis, kebijakan ini

merupakan bentuk balancing terhadap hegemoni Amerika Serikat dan sekutunya dalam sistem internasional yang tidak seimbang.

Kebijakan Rusia di Sektor Energi

Sektor energi merupakan tulang punggung utama perekonomian Rusia sekaligus sasaran strategis dari sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya sejak 2022. Sebelum embargo, ekspor energi khususnya minyak dan gas alam menyumbang lebih dari 40% dari pendapatan negara dan menjadi fondasi surplus anggaran serta cadangan devisa Rusia. Ketergantungan ekonomi terhadap sektor ini membuat Rusia sangat rentan terhadap tekanan eksternal, terutama pembatasan akses teknologi tinggi dan pasar Eropa.

Untuk menghadapi tekanan tersebut, Rusia menyusun respons strategis yang dituangkan dalam dokumen *Energy Strategy of the Russian Federation to 2035*. Strategi ini berfokus pada tiga aspek utama: diversifikasi mitra energi global, pengembangan mekanisme pembayaran alternatif, dan penguatan infrastruktur energi domestik.

Langkah pertama yang diambil adalah diversifikasi pasar energi. Rusia secara aktif mengalihkan ekspor gas dan minyaknya dari pasar Eropa ke negara-negara Asia, terutama China dan India. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas pipa gas *Power of Siberia* yang menghubungkan Siberia Timur dengan Tiongkok, serta penawaran diskon besar bagi pembeli India untuk mempertahankan volume ekspor. Pada tahun 2022–2023, perdagangan energi antara Rusia dan China meningkat signifikan, menjadikan China sebagai salah satu konsumen utama gas alam Rusia. Diversifikasi ini merupakan bagian dari strategi *Turn to the East*, yaitu orientasi geopolitik dan geoekonomi Rusia ke kawasan Asia Timur dan Selatan sebagai respons terhadap eksklusi dari pasar Barat.

Langkah kedua adalah pengembangan mekanisme pembayaran alternatif untuk menghindari sistem keuangan global yang dikendalikan oleh Amerika Serikat, seperti SWIFT. Rusia mulai mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi energi, seperti rubel, yuan, dan rupee. Bank Sentral Rusia bekerja sama dengan lembaga keuangan dari negara mitra untuk membentuk jalur pembayaran bilateral yang tidak tergantung pada

sistem dolar. Inisiatif ini mencerminkan strategi dedolarisasi yang lebih luas, di mana Rusia berupaya melepaskan ketergantungan terhadap dolar AS sebagai alat pembayaran internasional yang juga menjadi senjata sanksi.

Ketiga, Rusia memperkuat infrastruktur energi dalam negeri untuk mendukung ketahanan pasokan dan distribusi energi, terutama di wilayah timur dan utara yang mengarah ke pasar Asia dan kawasan Arktik. Proyek eksplorasi dan produksi minyak baru dikembangkan di Siberia, termasuk ladang gas Yamal LNG yang ditujukan untuk ekspor ke Asia melalui jalur laut utara (*Northern Sea Route*). Pemerintah juga mendorong integrasi teknologi energi dalam negeri untuk menggantikan peralatan dan teknologi eksplorasi yang sebelumnya diimpor dari Barat. Meskipun penggantian teknologi ini menyebabkan penurunan efisiensi di beberapa fasilitas, langkah ini dinilai sebagai langkah jangka panjang menuju otonomi industri energi nasional (Duong et al., 2025).

Selain itu, sektor energi juga digunakan sebagai alat diplomasi. Rusia menggunakan ketergantungan energi negara-negara mitra sebagai leverage politik dalam memperkuat hubungan bilateral. Diplomasi energi dilakukan secara aktif, tidak hanya melalui ekspor, tetapi juga melalui pembangunan proyek bersama seperti PLTN Akkuyu di Turki, serta penyediaan teknologi dan pelatihan untuk negara-negara sahabat. Dengan demikian, sektor energi berfungsi ganda: sebagai penyelamat ekonomi di masa krisis, dan sebagai instrumen kekuatan lunak dalam hubungan luar negeri.

Dari perspektif teori neorealisme, respons Rusia dalam sektor energi merupakan bentuk *balancing* internal di mana negara memperkuat sumber daya strategis domestiknya untuk mengimbangi tekanan eksternal tanpa harus sepenuhnya bergantung pada bantuan luar. Sanksi yang dikenakan oleh Amerika Serikat tidak hanya dilihat sebagai ancaman ekonomi, tetapi sebagai bentuk intervensi terhadap distribusi kapabilitas negara dalam sistem internasional. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil dalam sektor energi menunjukkan upaya strategis Rusia untuk mempertahankan otonomi kebijakan luar negeri dan kelangsungan kekuatan nasional dalam tatanan dunia yang penuh tekanan struktural (Waltz, 2008).

Keseluruhan strategi Rusia di sektor energi mencerminkan kemauan politik untuk bertahan dan beradaptasi di tengah eksklusi sistemik oleh Barat. Dengan memperluas pasar, menciptakan sistem keuangan alternatif, dan memperkuat kontrol domestik atas sumber daya strategis, Rusia tidak hanya bertahan dari embargo ekonomi, tetapi justru memanfaatkan krisis sebagai momentum untuk memperluas pengaruh globalnya.

Kebijakan Rusia dalam Industri Alutsista

Industri alat utama sistem senjata (alutsista) merupakan salah satu sektor strategis yang turut terdampak secara signifikan oleh embargo ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya sejak 2022. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya mencakup larangan ekspor peralatan militer dan teknologi canggih, tetapi juga pembatasan terhadap akses Rusia terhadap komponen penting untuk produksi sistem senjata, seperti semikonduktor, avionik, dan perangkat kendali presisi. Dampak langsung dari sanksi ini adalah terganggunya rantai pasok di sejumlah pabrik militer Rusia, khususnya yang sebelumnya bergantung pada produk dari negara-negara Eropa dan Amerika Utara.

Meskipun demikian, Rusia menunjukkan ketahanan yang cukup tinggi dalam sektor ini melalui tiga pendekatan utama: peningkatan substitusi impor, diversifikasi pasar ekspor, dan perluasan kerja sama pertahanan dengan negara-negara non-Barat. Pertama, substitusi impor dilakukan secara agresif oleh pemerintah melalui program substitusi industri (*import substitution program*) yang telah berjalan sejak 2014, namun dipercepat kembali pasca-2022. Perusahaan-perusahaan besar seperti Rostec dan Uralvagonzavod meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri untuk komponen-komponen kritis, dan bekerja sama dengan lembaga riset militer untuk mempercepat pengembangan teknologi alternatif yang dapat menggantikan produk-produk Barat.

Kedua, Rusia memperluas pasar ekspor alutsistanya ke negara-negara di kawasan *Global South* yang tidak terikat pada rezim sanksi Barat. Negara-negara seperti Aljazair, Mesir, India, Vietnam, dan beberapa negara Afrika Sub-Sahara tetap menjadi pembeli aktif produk senjata Rusia. Rusia menawarkan alternatif peralatan militer dengan harga lebih terjangkau

dibandingkan produk Barat, dan disertai skema kerja sama jangka panjang seperti pelatihan, pemeliharaan, dan transfer teknologi. Keberhasilan mempertahankan pasar ini menunjukkan bahwa embargo Barat tidak serta merta melemahkan posisi Rusia di pasar persenjataan global.

Ketiga, Rusia meningkatkan kerja sama militer bilateral dengan negara-negara sahabat melalui latihan gabungan, peningkatan pengiriman suku cadang, dan perjanjian dukungan logistik. Misalnya, latihan militer bersama dengan Tiongkok, India, dan Iran menjadi sarana penting untuk mempertahankan interoperabilitas serta memperkuat posisi diplomatik Rusia di kawasan strategis seperti Asia Tengah dan Timur Tengah. Kerja sama ini sekaligus memperkuat posisi Rusia sebagai kekuatan militer alternatif di luar blok NATO.

Menurut penelitian Zeng dan Dür (2025), sanksi ekonomi sering kali mendorong negara sasaran untuk meningkatkan belanja militer sebagai bentuk resistensi struktural. Hal ini tampak dalam kebijakan Rusia yang tetap mempertahankan anggaran pertahanan dan bahkan memperluas produksi senjata dalam negeri, meski berada di bawah tekanan ekonomi dan finansial. Sektor pertahanan dalam hal ini tidak hanya dipertahankan sebagai kebutuhan militer, tetapi juga sebagai alat stabilisasi ekonomi dan simbol ketahanan nasional.

Dari sudut pandang teori neorealisme, tindakan Rusia dalam industri alutsista merupakan bagian dari strategi *balancing* internal. Ketika tekanan eksternal meningkat melalui embargo, negara memperkuat kapabilitas pertahanannya untuk menghindari ketergantungan strategis terhadap kekuatan eksternal. Rusia, sebagai kekuatan besar, memandang kemandirian dalam industri pertahanan sebagai fondasi utama dalam menjaga otonomi kebijakan luar negeri dan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan dalam sistem internasional yang kompetitif dan penuh tekanan (Waltz, 2008).

Dengan mempertahankan produksi senjata dan memperluas kerja sama militer, Rusia berhasil menegaskan bahwa embargo tidak mampu melemahkan kapabilitas pertahanannya secara signifikan. Bahkan, dalam beberapa kasus, embargo justru menjadi katalisator bagi penguatan struktur

industri militer nasional dan perluasan jejaring pertahanan global non-Barat. Strategi ini menegaskan bahwa Rusia tidak hanya bertahan, tetapi juga melakukan ofensif diplomatik dan militer dalam menghadapi isolasi Barat.

Interpretasi dan Keterkaitan Antar Kebijakan

Ketiga kebijakan yang dijalankan Rusia dalam menghadapi embargo ekonomi Amerika Serikat yakni melalui forum BRICS, sektor energi, dan industri alutsista menunjukkan pola respons yang konsisten, terkoordinasi, dan saling menguatkan. Ketiganya mencerminkan strategi luar negeri yang bersifat reaktif-strategis: bukan hanya bertahan terhadap tekanan sanksi, tetapi secara aktif mengubah arah orientasi politik luar negeri Rusia ke wilayah yang lebih ramah secara ekonomi dan geopolitik.

Melalui BRICS, Rusia membangun jejaring kerja sama ekonomi dan keuangan yang mendukung agenda dedolarisasi dan memperluas legitimasi internasionalnya. Dalam sektor energi, Rusia tidak hanya mempertahankan ekspor, tetapi juga menggunakan energi sebagai alat diplomasi ekonomi dan sebagai sumber daya strategis untuk membangun relasi baru dengan negara-negara non-Barat. Sementara itu, pada sektor alutsista, Rusia tetap mampu mempertahankan dan bahkan memperluas pengaruh militernya di berbagai kawasan, meskipun akses terhadap komponen teknologi Barat dibatasi.

Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dalam konteks tujuan utama: mempertahankan kedaulatan nasional, stabilitas ekonomi, dan kapabilitas militer di tengah isolasi Barat. Misalnya, kerja sama BRICS membantu Rusia mempertahankan akses ke sistem pembayaran internasional yang mendukung perdagangan energi lintas negara. Pemasukan dari sektor energi, pada gilirannya, memungkinkan Rusia menjaga stabilitas anggaran negara, termasuk pembiayaan sektor pertahanan dan substitusi impor teknologi alutsista. Di sisi lain, kekuatan militer Rusia yang masih signifikan menjadi daya tarik dan alat negosiasi dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara BRICS dan mitra lainnya di *Global South*.

Secara teoritis, pola ini mendukung asumsi utama dari pendekatan neorealisme: bahwa negara, sebagai aktor rasional dalam sistem internasional yang anarkis, akan merespons perubahan struktur kekuasaan

dengan strategi balancing baik secara internal (penguatan ekonomi dan militer) maupun eksternal (pembentukan aliansi alternatif). Dalam hal ini, Rusia melakukan kedua bentuk balancing secara simultan. Embargo yang diberlakukan oleh Amerika Serikat bukan hanya dilihat sebagai tekanan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya hegemonik untuk mempertahankan dominasi dalam sistem internasional. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Rusia selama 2022–2023 menunjukkan upaya sistematis untuk keluar dari struktur dominasi Barat dan membentuk arsitektur kekuasaan global yang lebih multipolar (Waltz, 1979; Waltz, 2008).

Lebih jauh lagi, keterkaitan antar kebijakan ini mencerminkan kemampuan Rusia dalam melakukan adaptasi strategis multidimensi. Ketika embargo menyasar satu sektor, responsnya tidak bersifat sektoral semata, melainkan sistemik. Ketahanan energi memperkuat kemampuan fiskal nasional, yang pada gilirannya menopang stabilitas politik dan penguatan kapabilitas militer. Diplomasi multilateral melalui BRICS berfungsi untuk memecah isolasi, membangun narasi tandingan, serta menciptakan peluang ekonomi baru di luar kerangka Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Rusia tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga ofensif secara diplomatik dan ekonomi.

Dengan demikian, bahwa kebijakan luar negeri Rusia dalam menghadapi embargo ekonomi Amerika Serikat adalah kebijakan yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Aliansi politik, kekuatan ekonomi, dan kapabilitas militer diarahkan pada satu tujuan utama: mempertahankan posisi Rusia sebagai aktor penting dalam sistem internasional meskipun berada di bawah tekanan maksimal dari negara-negara Barat. Ketiga sektor kebijakan yang dianalisis dalam penelitian ini bukan hanya respons terhadap krisis, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang dalam upaya reposisi geopolitik Rusia di era multipolar.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Rusia dalam menghadapi embargo ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2022–2023. Berdasarkan pembahasan yang telah

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Rusia merespons tekanan sanksi ekonomi dengan kebijakan luar negeri yang bersifat reaktif-strategis, terstruktur, dan multidimensi. Kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meredam dampak jangka pendek dari embargo, tetapi juga untuk membentuk kembali posisi Rusia dalam sistem internasional.

Melalui forum BRICS, Rusia memperkuat kerja sama multilateral sebagai bentuk balancing eksternal terhadap dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Forum ini dimanfaatkan untuk mendorong dedolarisasi, memperluas akses pasar non-Barat, serta membangun sistem keuangan alternatif yang lebih inklusif bagi negara-negara Global South. Strategi ini menunjukkan upaya diplomasi aktif dalam mencari dukungan internasional dan memperluas ruang gerak Rusia di luar tekanan Barat.

Dalam sektor energi, Rusia melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara Asia, mempercepat proyek infrastruktur energi, serta mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional. Kebijakan ini tidak hanya berhasil menjaga stabilitas pendapatan negara, tetapi juga memperkuat posisi energi sebagai alat diplomasi luar negeri. Rusia menjadikan sektor energi sebagai kekuatan utama dalam menghadapi isolasi ekonomi sekaligus sebagai sarana membangun hubungan strategis baru.

Sementara itu, di sektor industri alutsista, Rusia mempertahankan produksi dan ekspor senjatanya melalui substitusi impor teknologi dan perluasan pasar ke negara-negara non-Barat. Kerja sama militer ditingkatkan melalui latihan gabungan dan penguatan hubungan bilateral di bidang pertahanan. Meskipun menghadapi pembatasan teknologi dari Barat, Rusia tetap mampu mempertahankan kapabilitas militernya, yang menjadi bagian penting dari kekuatan nasional dan daya tawar internasional.

Ketiga kebijakan ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam kerangka besar strategi balancing yang sejalan dengan pendekatan neorealisme. Rusia tidak hanya bertahan dari tekanan embargo, tetapi juga memanfaatkan situasi krisis untuk memperkuat kapabilitas nasional, memperluas aliansi, dan memproyeksikan pengaruhnya di tingkat global. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Rusia selama 2022–2023 dapat

dipahami sebagai bagian dari upaya strategis jangka panjang untuk menjaga kedaulatan dan mempertahankan peran sebagai kekuatan besar dalam sistem internasional yang semakin multipolar.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan baik untuk pengembangan akademik maupun praktik kebijakan di masa mendatang. Pertama, bagi studi hubungan internasional, penelitian ini menunjukkan pentingnya mengkaji sanksi ekonomi dan respons negara dari perspektif neorealisme, yang menekankan distribusi kapabilitas dan dinamika kekuatan dalam sistem internasional. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terhadap kasus negara-negara lain yang mengalami tekanan serupa, guna membandingkan strategi kebijakan luar negeri yang ditempuh dalam konteks tekanan struktural global.

Kedua, bagi pembuat kebijakan di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, studi ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya diversifikasi aliansi dan penguatan kapabilitas domestik sebagai bentuk ketahanan terhadap kemungkinan tekanan eksternal. Diplomasi energi, pengembangan sistem pembayaran alternatif, serta penguatan sektor pertahanan merupakan elemen penting yang dapat dijadikan rujukan dalam membangun strategi nasional yang lebih resilien di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Ketiga, bagi pemerintah Rusia, strategi kebijakan luar negeri yang telah dijalankan selama periode 2022–2023 menunjukkan efektivitas dalam jangka pendek, namun perlu diimbangi dengan upaya membangun kepercayaan jangka panjang di tingkat internasional. Rusia perlu memperkuat pendekatan diplomasi damai dan kerja sama pembangunan agar tidak semata-mata diposisikan sebagai kekuatan reaktif, melainkan sebagai aktor global yang konstruktif dalam membentuk tatanan dunia multipolar yang stabil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Duong, N. M., Efimova, N., & Gromova, E. (2025). The impact of import substitution on the performance of Russian energy companies after sanctions. *Journal of International Economic Research*, 18(1), 45–62.
- Huynh, T. T., Kudrin, M., & Smirnov, I. (2025). The Resilience of Russian Non-Financial Corporations under Western Sanctions. *Global Economic Journal*, 17(3), 88–101.
- Kementerian Energi Federasi Rusia. (2020). *Energy Strategy of the Russian Federation to 2035*. Moscow: Ministry of Energy of the Russian Federation.
- Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia. (2023). *Foreign Policy Concept of the Russian Federation 2023*. Moscow: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Waltz, K. N. (2008). *Realism and International Politics*. New York: Routledge.
- Zeng, L., & Dür, A. (2025). Military Spending and Strategic Response to Economic Sanctions: Evidence from Russia. *International Security Studies Quarterly*, 14(2), 112–129.